

## **PENDAHULUAN**

Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Data BPS 2014 menunjukkan UMKM di Indonesia sebanyak 57,9 juta unit atau 99,9 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional (Sambudi 2016). Hingga akhir tahun 2016, kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% serta serapan tenaga kerja pada sektor ini meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% (Tissor 2016).

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah terkait dengan pengukuran kinerja, sehingga pembukuan seringkali terabaikan (Hidayat 2004). Pelaku usaha kecil memandang bahwa pembukuan tidak terlalu penting untuk diterapkan. Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam pembukuan juga seringkali tidak disertai dengan pemenuhan sumber daya untuk menjalankan usaha (Sari 2011). Banyak di antara pelaku UKM tersebut belum memahami pentingnya pembukuan bagi kelangsungan usaha. Sari (2011) menambahkan kesadaran akan pentingnya pembukuan justru sering timbul ketika pelaku usaha tersebut harus berhadapan dengan institusi atau pihak lain yang mensyaratkan pembukuan untuk kegiatan tertentu.

Hermawan (2010) menunjukkan pembukuan pada UKM memiliki banyak kelemahan, karena menganggap usaha yang mereka kelola adalah usaha keluarga. Kurniawati, Nugroho dan Setiawati (2011) juga menjelaskan kurangnya kesadaran pelaku UKM akan pentingnya pembukuan, padahal dengan pembukuan dapat menghasilkan informasi untuk meningkatkan pengelolaan usaha (Setiawati 2010). Sebaliknya, Krisdiartiwi (2008) mencoba menggali bagaimana pembukuan pada UKM. Hasil penelitian menunjukkan pembukuan pada UKM hanya sebatas penerimaan kas dan pengeluaran kas. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawati, Nugroho dan Umiyarsih (2011), Kurniawati dan Hermawan (2012) serta Hartono (2013) yang menunjukkan pelaku UKM sudah menerapkan pembukuan pada transaksi harian mereka berupa catatan uang masuk, uang keluar, nota pembelian dan nota penjualan. Penelitian Kurniawati, Kurniawan, dan Kristiani (2013) serta Filadelfia (2015) juga meneliti bagaimana pelaku UKM mendapatkan informasi akuntansi dari pembukuan, bagaimana menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk penilaian kinerja, dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UKM melakukan pembukuan.

Selain itu, Penelitian Rohman, dkk (2011) mengkaji kapabilitas pembukuan UKM dalam mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan

pembukuan yang baik akan memberi kemudahan bagi pelaku UKM dalam membuat keputusan mengenai berapa pajak yang akan mereka bayar, walaupun penyelenggaraan pembukuan tidak semata-mata untuk perhitungan pajak saja, namun keinginan melihat kinerja operasi serta besarnya keuntungan yang mereka peroleh.

Melihat fenomena di atas, penggunaan pembukuan bagi pelaku UKM menjadi menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya pelaku UKM sudah mempunyai catatan pembukuan dalam kegiatan usaha walaupun masih dilakukan secara sederhana. Penelitian tentang penggunaan pembukuan sebelumnya pernah dilakukan oleh Sari (2011) yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembukuan timbul ketika pelaku usaha tersebut harus berhadapan dengan institusi atau pihak lain yang mensyaratkan pembukuan untuk kegiatan tertentu. Kemudian Rohman, dkk (2011) juga menunjukkan pembukuan yang baik akan memberi kemudahan bagi pelaku UKM dalam membuat keputusan mengenai berapa pajak yang akan mereka bayar, walaupun penyelenggaraan pembukuan tidak semata-mata untuk perhitungan pajak saja, namun keinginan melihat kinerja operasi serta besarnya keuntungan yang mereka peroleh. Belum ada penelitian yang menunjukkan apakah pembukuan yang dilakukan pelaku UKM tersebut merupakan kebutuhan dalam pengelolaan usaha atau

sebenarnya hanya digunakan sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu.

Penelitian akan menjelaskan informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UKM dalam pembukuan, serta penggunaan pembukuan apakah untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan usaha atau hanya digunakan sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana penggunaan pembukuan oleh pelaku UKM. Diharapkan hasil penelitian memberi pengetahuan bagi pelaku UKM tentang penggunaan pembukuan dan menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga untuk memberi informasi lebih lanjut dalam peningkatan pembinaan, pendampingan maupun pelatihan pembukuan bagi para pelaku UKM, serta menjadi pengembangan literatur dalam bidang akuntansi khususnya pembukuan UKM.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Informasi Akuntansi**

Warren, Reeve and Fess (2005) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Ini berarti akuntansi adalah kegiatan penyediaan informasi.

*Accounting information is raw data concerning transactions that have been transformed into financial numbers that can be used by economic decision makers* (Jones et al. 1996). Ini berarti informasi akuntansi merupakan data mentah transaksi yang telah berubah menjadi angka-angka finansial yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan ekonomi. Jones et al. (1996) juga menyatakan bahwa informasi akuntansi adalah informasi tentang perhitungan keuangan yang penting bagi operasi bisnis. Menurut Williams et al. (2008), jenis-jenis informasi akuntansi yang dibutuhkan tergantung pada jenis kebutuhan bisnis yang dibuat oleh manajemen.

Fiorelli dan Zifaro (2008) dalam Handayani (2011), mengklasifikasikan informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda sesuai dengan manfaat bagi pengguna, antara lain (1) *Statutory Accounting Information*, merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada, (2) *Budgetary Information*, merupakan informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian dan pengambilan keputusan, serta (3) *Additional Accounting Information*, merupakan informasi akuntansi lainnya yang disiapkan perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Pacter (2007) dalam Handayani (2011) menyebutkan beberapa manfaat informasi akuntansi bagi UKM, antara lain sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan usaha, seperti keputusan pengembangan pasar dan penetapan harga jual, dasar penilaian kinerja, perencanaan dan pengendalian usaha, mengetahui perkembangan usaha, modal dan besarnya keuntungan, serta bahan analisa pemberian kredit bagi pihak bank.

Bagi usaha kecil, akuntansi sering digambarkan sebagai proses pelaporan keuangan yang sangat sederhana dan dikenal sebagai pembukuan (Karyawati 2008). Penerapan akuntansi dalam UKM tergantung pada pengetahuan pelaku usaha tersebut, hal ini akan berpengaruh pada proses akuntansi yang digunakan dalam menghasilkan informasi (Saraswati 2011). Dalam hal ini, informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian berasal dari pembukuan.

### **Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Karyawati (2008) mendefinisikan pembukuan sebagai proses pencatatan transaksi atau kejadian keuangan dalam buku seperti catatan, agenda atau bahkan dalam bentuk catatan lain. Pencatatan transaksi itu sendiri merupakan kegiatan mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Hartono (2013) mengungkapkan mencatat setiap transaksi menjadi sangat penting karena dapat digunakan sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan. Transaksi yang perlu dicatat pelaku UKM adalah transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian (baik tunai maupun kredit), penjualan (baik tunai maupun kredit), persediaan, utang dan piutang.

Karyawati (2008) menunjukkan pembukuan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hanya mencatat transaksi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, serta catatan utang piutang. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan arus kas, laporan laba rugi serta neraca yang didasarkan pada bukti-bukti transaksi seperti nota, faktur, kwitansi dan bukti transfer (Wahyuni 2014). Selain itu Rohman, dkk (2011) memberi bukti dengan pembukuan yang baik akan memberi kemudahan bagi pelaku UKM dalam membuat keputusan, baik itu mengenai kinerja usaha, besarnya keuntungan yang mereka peroleh maupun berapa pajak yang akan mereka bayar.

### **Pembukuan Sebagai Kebutuhan Pengelolaan Usaha**

Sudarsono dan Prihandoko (2007) menjelaskan manfaat pembukuan dan keputusan usaha yang dapat diambil dari pembukuan, antara lain sebagai dasar penilaian kinerja usaha dan bahan evaluasi yang akan datang, dasar pertimbangan pembelian bahan baku dan alat-alat produksi, membantu dalam pembuatan keputusan mengenai penentuan harga jual, dasar

penyusunan anggaran periode berikutnya, penambahan aset usaha dan promosi usaha, serta penambahan dan pengembangan tenaga kerja.

Considine et al. (2010) menyebutkan peran akuntansi untuk mengumpulkan data-data tentang kegiatan bisnis, menyediakan sarana untuk menyimpan dan mengolah data dan kemudian mengkonversi data tersebut menjadi informasi yang berguna. Hal ini berarti kegunaan utama dari pembukuan usaha justru bagi kepentingan internal, yaitu membantu pelaku usaha tersebut mengendalikan keuangan usahanya. Sudarsono dan Prihandoko (2007) menambahkan perlunya kesadaran bagi pelaku UKM akan pentingnya pembukuan sehingga dapat dipisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi.

Selain itu, Wahyuni (2014) juga menunjukkan dengan pembukuan, pelaku UKM memperoleh informasi tentang operasional usaha mereka, baik modal usaha, total aset atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki, omset atau hasil penjualan pertahun, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja yang dimiliki serta jumlah bahan baku utama, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam produksi, yang dapat mereka gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan usaha.



## **Pembukuan Sebagai Syarat Pemenuhan Administrasi**

Ulbert (2005) mendefinisikan administrasi sebagai penyusunan data dan informasi secara sistematis, dengan tujuan menyediakan keterangan dan memudahkan memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Farida (2009) menyatakan administrasi berhubungan dengan ketatausahaan yang meliputi surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan dengan tujuan tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan administrasi merupakan proses penyusunan data dan informasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, memberikan izin kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagai tanda legalitas kepada pelaku usaha kegiatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bertujuan memberi kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya.

Bagi pelaku usaha kecil, penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memiliki banyak manfaat. Hutari (2016) menyebutkan manfaat penerbitan izin usaha mikro dan kecil tersebut antara lain adanya kemudahan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain, memberi kesadaran dan mendorong pelaku usaha membayar pajak, kemudahan memperoleh akses permodalan, perlindungan pada tempat lokasi usaha, serta pendampingan dan pengembangan usaha dari pemerintah pusat maupun daerah.

Selain Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), informasi akuntansi dalam pembukuan dapat digunakan sebagai syarat pengurusan administrasi, khususnya bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel 1 dibawah ini menunjukkan penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan sebagai syarat administrasi antara lain:

**Tabel 1**  
**Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam**  
**Pembukuan Sebagai Syarat Administrasi**

No.	Syarat Administrasi	Peraturan	Informasi Akuntansi yang dibutuhkan
1	Kredit pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012	Meliputi: ✓ Penghasilan kotor/bulan ✓ Pengeluaran untuk usaha ✓ Pengeluaran rumah tangga ✓ Pengeluaran lain-lain ✓ Penghasilan bersih/bulan

2	Akses bantuan dari pemerintah maupun swasta.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012	Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penghasilan kotor/bulan</li> <li>✓ Pengeluaran untuk usaha</li> <li>✓ Pengeluaran rumah tangga</li> <li>✓ Pengeluaran lain-lain</li> <li>✓ Penghasilan bersih/bulan</li> </ul>
3	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2004	Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah modal usaha</li> <li>✓ Aset atau sarana yang digunakan dalam usaha.</li> </ul>
4	Izin Pendirian Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah (SIUP)	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009. (Lampiran I Permendag No.46/M-DAG/PER/9/2009)	Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nilai kekayaan bersih usaha (selain tanah dan bangunan tempat usaha)</li> <li>✓ Kepemilikan modal</li> <li>✓ Omset (hasil penjualan tahunan)</li> <li>✓ Jumlah tenaga kerja</li> </ul>
5	Permohonan Izin Gangguan (HO)	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009	Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aset atau jumlah kekayaan</li> <li>✓ Jumlah bahan baku penolong yang digunakan</li> <li>✓ Kapasitas produksi</li> <li>✓ Peralatan produksi yang digunakan</li> <li>✓ Jumlah tenaga kerja</li> </ul>
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	Undang-undang No. 3 Tahun 1982, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri	Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omset usaha/tahun</li> <li>✓ Modal yang dimiliki</li> <li>✓ Total aset (setelah usaha beroperasi)</li> <li>✓ Kapasitas produksi/tahun</li> </ul>

			Perdagangan RI No. 77/M- DAG/PER/12/2013
7	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Peraturan Pemerintah RI No. 107 Tahun 2015	Meliputi: ✓ Nilai kekayaan bersih usaha (selain tanah dan bangunan tempat usaha) ✓ Omset (hasil penjualan tahunan) ✓ Jumlah tenaga kerja
8	Hak Atas Tanah (HAT)	Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996	Meliputi: ✓ Total aset berupa tanah yang dimiliki. ✓ Omset usaha/tahun
9	Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Undang-undang No. 18 Tahun 2012	Meliputi: ✓ Jumlah bahan baku yang digunakan ✓ Jumlah bahan tambahan yang digunakan ✓ Jumlah bahan penolong yang digunakan ✓ Kapasitas produksi/tahun ✓ Omset usaha/tahun
10	Izin Sertifikat Halal	Undang-undang No. 33 Tahun 2014	Meliputi: ✓ Jumlah penjualan/minggu ✓ Jumlah bahan baku yang digunakan ✓ Jumlah bahan tambahan yang digunakan ✓ Jumlah bahan penolong yang digunakan
11	Perizinan Hak Merek Dagang	Undang-undang No. 15 Tahun 2001	Meliputi: ✓ Kapasitas produksi ✓ Omset penjualan/tahun ✓ Modal yang dimiliki

12	Pelaporan perpajakan usaha.	Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013	Meliputi: ✓ Penghasilan/bln ✓ Omzet/peredaran usaha/penjualan kotor rata-rata/bulan. ✓ Merk dagang/usaha ✓ Jumlah tenaga kerja.
----	-----------------------------	---------------------------------------	---

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Pembukuan pada UKM dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan mengakses pembiayaan dari perbankan (Karyawati 2008), Namun dalam praktiknya, Bhinadi (2010) dan Sari (2011) menunjukkan masih terbatasnya akses pelaku UKM terhadap sumber pembiayaan karena belum memiliki pembukuan yang tersusun baik, belum bisa menyusun *business plan* sebagai syarat pengajuan proposal pembiayaan kredit usaha, serta khususnya pemilik usaha kecil, banyak yang tidak memiliki agunan sebagai jaminan kredit.

Sebaliknya Agustika, dkk (2015) mengungkapkan pembukuan dapat digunakan sebagai informasi dalam mengakses kredit dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan pemerintah daerah, karena pada dasarnya pemberian fasilitas bantuan permodalan (kredit) dalam rangka pengembangan usaha, sehingga catatan-catatan dalam pembukuan penting untuk digunakan.

Dalam Salinan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

(KUR), dimana KUR adalah kredit yang berfungsi sebagai modal kerja dan atau investasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang usaha produktif dan layak tetapi belum mampu memenuhi persyaratan bank. KUR diberikan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan plafon mulai dari Rp. 20 juta sampai Rp. 500 juta. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha UKM harus mengajukan surat permohonan KUR kepada bank disertai legalitas usaha seperti akta pendirian, akta usaha dan NPWP, perizinan usaha seperti SIUP, TDP, SK Domilisi, serta catatan pembukuan usaha atau laporan keuangan dan salinan bukti agunan jika diperlukan.

Penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan juga dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman di bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimana dalam memberikan kredit atau pembiayaan bagi UMKM, yang menjadi salah satu persyaratannya adalah informasi dari pembukuan.

## METODA PENELITIAN

Populasi penelitian adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Salatiga sebanyak 113 unit, yang merupakan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga per triwulan 1 tahun 2016. Sampel penelitian ditetapkan sebesar 88 pelaku usaha dengan pengambilan sampel diukur menggunakan formula sebagai berikut (Yamane 1973 dalam Wibowo dan Kurniawati 2014):

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana :

$n$  = jumlah sampel

$N$  = ukuran populasi

$d$  = tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi (5%)

$$n = \frac{113}{113(0,05)^2 + 1} = 88,10 \rightarrow \text{pembulatan } 88$$

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu (Supramono dan Utami 2004). Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah pelaku UKM yang sudah memiliki catatan pembukuan atas pengelolaan usaha dan bergerak dalam bidang jasa, dagang dan manufaktur.

Definisi mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Usaha Berdasarkan Aset dan Omzet**

No.		Kriteria	
		Aset (Rp)	Omzet/tahun (Rp)
1.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Miliar
2.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	>2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

Jenis data yang digunakan adalah data primer, melalui penyebaran kuesioner terhadap pelaku UKM di Kota Salatiga. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian, yaitu identitas responden dan profil usaha, jenis-jenis informasi akuntansi dalam pembukuan, penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha, penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan sebagai syarat administrasi, serta manfaat informasi akuntansi dari pembukuan yang dilakukan.

Definisi operasional serta indikator empirik penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan akan dijelaskan dalam Tabel 3 berikut:



**Tabel 3**  
**Variabel, Definisi Operasional dan Indikator Empirik**  
**Informasi Akuntansi**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Empirik
Informasi Akuntansi	<p>Data mentah transaksi yang telah berubah menjadi angka-angka finansial yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan ekonomi.</p> <p>(Jones et al. 1996)</p>	<p>1. <i>Statutory Accounting</i></p> <p>Menggunakan informasi akuntansi dari pembukuan sesuai dengan standar peraturan dari bank, koperasi, paguyuban</p> <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan Laba Rugi,</li> <li>✓ Neraca,</li> <li>✓ Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>✓ Laporan Arus Kas.</li> </ul> <p>(Wibowo dan Kurniawati 2014).</p> <hr/> <p>2. <i>Budgetary Information</i></p> <p>Menggunakan informasi akuntansi dari pembukuan untuk anggaran usaha selanjutnya (Wibowo dan Kurniawati 2014).</p> <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Catatan Biaya, dan</li> <li>✓ Catatan Penjualan (<i>Sales Order</i>)</li> </ul> <p>(Wibowo dan Kurniawati 2014).</p>

---

### 3. *Additional Accounting Information*

Menggunakan informasi akuntansi dari pembukuan guna meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan

Meliputi:

- ✓ Catatan Kas Masuk
  - ✓ Catatan Kas Keluar,
  - ✓ Piutang Dagang,
  - ✓ Utang Dagang,
  - ✓ Persediaan,
  - ✓ Penjualan,
  - ✓ Biaya Gaji, dan
  - ✓ Daftar Harga (Wibowo dan Kurniawati 2014).
- 

Definisi operasional serta indikator empirik penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha akan dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Definisi Operasional dan Indikator Empirik Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pembukuan sebagai Kebutuhan Pengelolaan Usaha**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator Empirik</b>
Penggunaan Informasi Akuntansi	Proses, cara atau perbuatan menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif	1. Menggunakan informasi akuntansi untuk memperkirakan kebutuhan uang kas di masa yang akan datang.

---

tindakan.

(Deswira, Neldi dan Lusiana 2009).

2. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengontrol besarnya biaya yang dikeluarkan.
3. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas.
4. Menggunakan informasi akuntansi untuk memberikan dukungan terhadap proses produksi.
5. Menggunakan informasi akuntansi untuk menyusun strategi usaha.
6. Menggunakan informasi akuntansi untuk melakukan aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha.

---

Jenis-jenis Informasi Akuntansi

1. Informasi operasi  
Informasi akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas operasional usaha.

(Anthony and Reece 1989).

7. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah produksi setiap hari.
  8. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah pembelian bahan baku.
  9. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah pemakaian bahan baku.
-

	10. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah penjualan setiap harinya.
2. Informasi akuntansi manajemen Informasi akuntansi yang berkaitan dengan rencana kegiatan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha. (Anthony and Reece 1989).	11. Menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan kegiatan usaha. 12. Menggunakan informasi akuntansi untuk menjalankan usaha. 13. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengendalikan usaha.
3. Informasi akuntansi keuangan Informasi akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan usaha. (Anthony and Reece 1989).	14. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan. 15. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja usaha. 16. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui kenaikan dan penurunan modal.

Definisi operasional serta indikator empirik penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan sebagai syarat administrasi akan dijelaskan dalam Tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Definisi Operasional dan Indikator Empirik dari**  
**Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pembukuan sebagai**  
**Syarat Administrasi**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator Empirik</b>
Informasi akuntansi sebagai syarat administrasi keuangan	Kredit pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya.  (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012)	1. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan kredit pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya.  Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penghasilan kotor/bulan</li> <li>✓ Pengeluaran untuk usaha</li> <li>✓ Pengeluaran rumah tangga</li> <li>✓ Pengeluaran lain-lain</li> <li>✓ Penghasilan bersih/bulan</li> </ul>
	Akses bantuan dari pemerintah maupun swasta.  (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012)	2. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat akses bantuan dari pemerintah maupun swasta.  Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penghasilan kotor/bulan</li> <li>✓ Pengeluaran untuk usaha</li> <li>✓ Pengeluaran rumah tangga</li> <li>✓ Pengeluaran lain-lain</li> <li>✓ Penghasilan bersih/bulan</li> </ul>

Informasi akuntansi sebagai syarat administrasi lainnya.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2004

3. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan izin usaha mikro dan kecil (IUMK).

Meliputi:

- ✓ Jumlah modal usaha
- ✓ Aset atau sarana yang digunakan dalam usaha

Izin Pendirian Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009. (Lampiran I Permendag No.46/M-DAG/PER/9/2009)

4. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan surat izin pendirian usaha kecil dan menengah (SIUP).

Meliputi:

- ✓ Nilai kekayaan bersih usaha (selain tanah dan bangunan tempat usaha)
- ✓ Kepemilikan modal
- ✓ Omset (hasil penjualan tahunan)
- ✓ Jumlah tenaga kerja

Permohonan Izin Gangguan (HO)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

5. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan permohonan izin gangguan (HO).

Meliputi:

- ✓ Aset atau jumlah kekayaan
- ✓ Jumlah bahan baku penolong yang digunakan
- ✓ Kapasitas produksi
- ✓ Peralatan produksi yang digunakan
- ✓ Jumlah tenaga kerja

<p>Tanda Daftar Industri (TDI)</p> <p>Undang-undang No. 3 Tahun 1982,</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/3/2016</p> <p>Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 77/M-DAG/PER/12/2013</p>	<p>6. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan perolehan tanda daftar industri (TDI).</p> <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omset usaha/tahun</li> <li>✓ Modal yang dimiliki</li> <li>✓ Total aset (setelah usaha beroperasi)</li> <li>✓ Kapasitas produksi/tahun</li> </ul>
<p>Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</p> <p>Peraturan Pemerintah RI No. 107 Tahun 2015</p>	<p>7. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan surat izin tempat usaha (SITU)</p> <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nilai kekayaan bersih usaha (selain tanah dan bangunan tempat usaha)</li> <li>✓ Omset (hasil penjualan tahunan)</li> <li>✓ Jumlah tenaga kerja</li> </ul>
<p>Hak Atas Tanah (HAT)</p> <p>Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996</p>	<p>8. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan perolehan hak atas tanah (HAT).</p> <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Total aset berupa tanah yang dimiliki.</li> <li>✓ Omset usaha/tahun</li> </ul>
<p>Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)</p> <p>Undang-undang No. 18 Tahun 2012</p>	<p>9. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) oleh Dinas Kesehatan Kota.</p>

		<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah bahan baku yang digunakan</li> <li>✓ Jumlah bahan tambahan yang digunakan</li> <li>✓ Jumlah bahan penolong yang digunakan</li> <li>✓ Kapasitas produksi/tahun</li> <li>✓ Omset usaha/tahun</li> </ul>
Izin Sertifikat Halal	10. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan izin sertifikat halal pada produk, oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah penjualan/minggu</li> <li>✓ Jumlah bahan baku yang digunakan</li> <li>✓ Jumlah bahan tambahan</li> <li>✓ Jumlah bahan penolong</li> </ul>
Undang-undang No. 33 Tahun 2014		
Perizinan Hak Merek Dagang	11. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pengajuan perizinan hak merek dagang.	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kapasitas produksi</li> <li>✓ Omset penjualan/tahun</li> <li>✓ Modal yang dimiliki</li> </ul>
Undang-undang No. 15 Tahun 2001		
Informasi akuntansi sebagai syarat pelaporan perpajakan.	Pelaporan perpajakan usaha. (Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013)	12. Menggunakan informasi akuntansi sebagai syarat pelaporan perpajakan usaha.



---

Meliputi:

- ✓ Penghasilan/bln
  - ✓ Omzet/peredaran usaha/penjualan kotor rata-rata/bulan.
  - ✓ Merk dagang/usaha
  - ✓ Jumlah tenaga kerja.
- 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk mengolah data responden dan profil usaha, jenis-jenis informasi akuntansi dari pembukuan serta penggunaan informasi akuntansi dalam pembukuan terhadap setiap item pertanyaan pada kuesioner yang telah dibagikan dalam bentuk tabel, yang menggambarkan apakah penggunaan pembukuan UKM sebagai kebutuhan pengelolaan usaha atau sebagai syarat administrasi.

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul, menghitung persentase masing-masing indikator pertanyaan, kemudian membuat analisis dan interpretasi dari hasil yang telah diolah.

Langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis informasi akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UKM dalam pembukuan, dan

2. Mengidentifikasi penggunaan pembukuan, apakah pembukuan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan usaha atau sebagai syarat administrasi tertentu.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini, akan dibahas analisis deskriptif terhadap data penelitian dari sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UKM dari 4 (empat) Kecamatan. Sebanyak 88 pelaku UKM tersebut memenuhi kriteria usaha, baik berdasarkan aset maupun omzet yang dimiliki dan layak dijadikan sampel penelitian. Responden penelitian terdiri dari sektor usaha dagang, konveksi, industri kerajinan dan industri makanan olahan.

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan identitas pelaku usaha dan profil UKM. Pada Tabel 6, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (55,7%), dengan tingkat pendidikan SMU (52,3%) dan berusia 46-60 tahun (48,8%). Profil usaha responden terdiri dari sektor usaha, lama mengelola usaha, jumlah tenaga kerja, total omzet perbulan, total aset, area pemasaran usaha, jenis transaksi dan sumber

pendanaan usaha. Tabel 6 juga menunjukkan 69,3% responden berasal dari sektor usaha makanan olahan, dengan lama usaha 2-10 tahun (55,7%) dan memiliki tenaga kerja 1-10 orang (81,8%).

Dalam perolehan omzet penjualan sebanyak 80,7% responden memiliki total omzet Rp >25 juta sampai Rp 50 juta perbulan dan total aset sebesar Rp >50 juta sampai Rp 250 juta (93,2%). Hanya ditemukan 1 (satu) pelaku UKM yang memiliki aset usaha lebih dari Rp 500 juta perbulan. Untuk area pemasaran usaha 52,3% responden memiliki area pemasaran di luar kota dengan transaksi secara tunai (62,5%) sedangkan sisanya 37,5% melakukan transaksi secara tunai maupun kredit. Pada sumber pendanaan, pemilik usaha mengandalkan modal sendiri (52,1%) yang berasal dari tabungan dan hasil penjualan aset. Sisanya 43,1% responden mengajukan pinjaman di Bank sebagai modal usaha dan 4,8% responden menggunakan sumber pinjaman dari lembaga keuangan lain non Bank, seperti koperasi simpan pinjam dan pinjaman pada paguyuban PKK.

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden**

Jml Resp.		(%)	Jml Resp.		(%)
<b>A. Jenis Kelamin</b>			<b>G. Total Omzet/bulan (Rp)</b>		
Laki-laki	39	44,3	>25 juta – 50 juta	71	80,7
Perempuan	49	55,7	51 juta – 100 juta	14	15,9
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>	>100 juta	3	3,4
<b>B. Pendidikan Terakhir</b>			<b>H. Total Aset (Rp)</b>		
SD	6	6,8	>50 juta – 250 juta	82	93,2
SMP	13	14,8	251 juta – 500 juta	5	5,7
SMU	46	52,3	>500 juta	1	1,1
D3	6	6,8	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>
S1	16	18,2			
S2	1	1,1			
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>			
<b>C. Usia Pemilik (Tahun)</b>			<b>I. Area Pemasaran Usaha</b>		
30-45	32	36,4	Lokal	15	17,1
46-60	43	48,8	Luar kota	46	52,3
61-75	13	14,8	Luar Pulau	23	26,1
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>	Luar Negeri	4	4,5
<b>D. Sektor Usaha</b>			<b>J. Jenis Transaksi</b>		
Dagang	4	4,5	Tunai	55	62,5
Konveksi	12	13,6	Kredit	0	0
Industri	11	12,5	Tunai maupun kredit	33	37,5
Kerajinan			<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>
Makanan	61	69,3			
Olahan					
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>			
<b>E. Lama Mengelola Usaha (th)</b>			<b>K. Sumber Pendanaan*</b>		
2-10	49	55,7	Modal sendiri	75	52,1
11-20	24	27,3	Pinjaman dari Bank	62	43,1
>20	15	17,0	Pinjaman dari Lembaga Keuangan	7	4,8
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>	Lain Non-Bank		
<b>F. Jumlah Tenaga Kerja (org)</b>					
1-10	72	81,8			
11-50	14	15,9			
>50	2	2,3			
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>			

Sumber: Data Primer, 2017

(\*) Catatan: responden dimungkinkan memilih lebih dari satu alternatif jawaban.

## **Informasi Akuntansi yang dimiliki Pelaku UKM dalam Pembukuan**

Berikut adalah Tabel 7 yang menyajikan informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UKM dalam pembukuan:

**Tabel 7**  
**Informasi Akuntansi yang dimiliki Pelaku UKM dalam Pembukuan**

	<b>Jumlah Resp.</b>	<b>(%)</b>
<b>Informasi <i>Additional Accounting</i>*</b>		
Catatan Kas Masuk	88	100
Catatan Kas Keluar	88	100
Catatan Biaya Gaji	88	100
Catatan Biaya Operasional	88	100
Catatan Persediaan	80	90,9
Catatan Pembelian	78	88,6
Catatan Penjualan	78	88,6
Catatan Biaya Transportasi	45	51,1
Catatan Utang Dagang	44	50,0
Catatan Piutang Dagang	44	50,0
Catatan Daftar Harga ( <i>Price List</i> )	25	28,4
Catatan Biaya Service Mesin dan Kendaraan	21	23,8
<b>Informasi <i>Budgetary</i> *</b>		
Tidak Memiliki Catatan Perkiraan Biaya	59	67,0
Catatan Perkiraan Biaya Produksi	14	15,9
Catatan Perkiraan Biaya Operasional Usaha	14	15,9
Catatan Perkiraan Biaya Bahan Baku	12	13,6
Catatan Perkiraan Biaya Transport	12	13,6
Catatan Perkiraan Penjualan ( <i>Sales Order</i> )	10	11,4

**Informasi Statutory Accounting \***

Tidak Memiliki Laporan Keuangan	85	96,6
Laporan Laba Rugi	3	3,4
Laporan Arus Kas	3	3,4
Neraca	1	1,1
Laporan Perubahan Ekuitas	0	0,0

Sumber: Data Primer, 2017

(\*) Catatan: responden dimungkinkan memilih lebih dari satu alternatif jawaban.

Tabel 7 di atas menunjukkan seluruh pelaku UKM memiliki catatan kas masuk, catatan kas keluar, catatan biaya gaji serta catatan biaya operasional pemakaian listrik, air dan telepon dalam pembukuan. Pelaku UKM mengungkapkan dengan catatan-catatan tersebut mereka sudah dapat melihat kondisi keuangan usaha, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar dan uang digunakan untuk apa saja. Untuk catatan perkiraan biaya, sebanyak 67% pelaku UKM justru tidak memiliki catatan tersebut. Pelaku UKM merasa tidak memerlukan catatan perkiraan biaya karena selama ini perhitungan biaya dalam usaha dilakukan berdasarkan ingatan saja. Sama halnya dengan catatan perkiraan biaya, sebanyak 96,6% pelaku UKM tidak memiliki laporan keuangan. Hanya 3 pelaku UKM yang sudah memiliki laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca. Sebenarnya, pelaku UKM memiliki catatan-catatan yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan, namun pelaku UKM merasa belum perlu membuat dan memiliki laporan

keuangan karena menganggap usaha yang mereka jalankan masih skala rumah tangga.

### **Penggunaan Pembukuan**

Untuk mengidentifikasi intensitas penggunaan pembukuan oleh pelaku UKM, baik penggunaan pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha maupun sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu, akan disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Penggunaan Pembukuan Sebagai Kebutuhan Pengelolaan Usaha**

<b>Penggunaan Pembukuan</b>	<b>Tidak Pernah</b>	<b>Sekali-kali</b>	<b>Kadang Kadang</b>	<b>Sering</b>	<b>Sangat Sering</b>
Memperkirakan kebutuhan kas di masa yang akan datang	0,0%	19,3%	4,6%	72,7%	3,4%
Mengontrol besarnya biaya yang dikeluarkan	0,0%	23,9%	5,6%	68,2%	2,3%
Mengukur dan meningkatkan produktivitas	1,1%	62,5%	15,9%	17,1%	3,4%
Memberikan dukungan terhadap proses produksi	4,5%	68,2%	11,4%	14,8%	1,1%
Menyusun strategi usaha	1,1%	8,0%	3,4%	79,5%	8,0%
Melakukan aktivitas operasional	1,1%	62,5%	11,4%	21,6%	3,4%
Mengetahui jumlah produksi setiap hari	0,0%	3,5%	4,5%	81,8%	10,2%
Mengetahui jumlah pembelian bahan baku	1,1%	3,5%	0,0%	85,2%	10,2%
Mengetahui jumlah	1,1%	3,5%	0,0%	85,2%	10,2%

pemakaian bahan baku					
Mengetahui jumlah	1,1%	2,3%	0,0%	87,5%	9,1%
penjualan setiap hari					
Merencanakan kegiatan	0,0%	72,	4,6%	15,9%	6,8%
usaha		7%			
Menjalankan usaha	0,0%	77,3%	5,7%	13,6%	3,4%
Mengendalikan usaha	0,0%	77,3%	5,7%	14,7%	2,3%
Mengetahui posisi	0,0%	75,0%	9,1%	11,4%	4,5%
keuangan					
Mengetahui kinerja	0,0%	75,0%	9,1%	12,5%	3,4%
usaha					
Mengetahui kenaikan	0,0%	8,0%	71,6%	19,3%	1,1%
dan penurunan modal					
Menyusun laporan	0,0%	27,3%	56,8%	14,8%	1,1%
keuangan sesuai standar					
peraturan Bank/lembaga					
keuangan lain					
Menyusun anggaran dan	2,3%	59,1%	11,3%	25,0%	2,3%
perkiraan selanjutnya					
Dasar pengambilan	1,1%	11,4%	1,1%	76,1%	10,2%
keputusan					
<b>Rata-rata</b>	<b>0,76%</b>	<b>38,96%</b>	<b>12,21%</b>	<b>42,99%</b>	<b>5,07%</b>

Sumber: Data Primer, 2017

(\*) Catatan: responden dimungkinkan memilih lebih dari satu alternatif jawaban.

Pada Tabel 8, intensitas penggunaan pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha dikelompokkan menjadi 5 yaitu tidak pernah, sekali-kali, kadang-kadang, sering dan sangat sering. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UKM menyatakan sering (42,99%) dan sangat sering (5,07%) menggunakan pembukuan sebagai kebutuhan dalam pengelolaan usaha. Penggunaan pembukuan tersebut digunakan pelaku UKM untuk



mengetahui jumlah penjualan setiap hari, mengetahui jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku, mengetahui jumlah produksi setiap hari, menyusun strategi usaha, dasar pengambilan keputusan, memperkirakan kebutuhan kas di masa yang akan datang, serta mengontrol besarnya biaya yang dikeluarkan. Kemudian 38,96% pelaku UKM hanya sekali-kali saja menggunakan pembukuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, mengetahui posisi keuangan dan kinerja usaha, serta untuk merencanakan kegiatan usaha.

Selanjutnya penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi, baik syarat administrasi dalam pengajuan kredit di Bank dan bantuan pemerintah atau swasta, maupun syarat administrasi dalam pengajuan operasional lainnya seperti IUMK, SIUP, HO, TDI, SITU, HAT, PIRT, Sertifikat Halal, Merk Dagang dan untuk pelaporan perpajakan pelaku UKM, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Penggunaan Pembukuan Sebagai Syarat Administrasi**

Informasi Akuntansi dalam pembukuan	Kredit bank	Bantuan pemerintah / swasta	IUMK	SIUP	HO	TDI	SITU	HAT	PIRT	Sert. Halal	Merk dagang	Pelaporan perpajakan
Penghasilan kotor perbulan	70,5%	8%		30%		26%	3%	1%	57%	36%	31%	45%
Pengeluaran untuk usaha	70,5%	8%										
Pengeluaran rumah tangga	70,5%	8%										
Pengeluaran lain-lain	56,8%	6%										
Penghasilan bersih / bulan	56,8%	6%										45%
Jumlah modal usaha			49%			26%					31%	
Total aset/sarana yang digunakan			49%	30%	17%	26%	3%	1%				
Kepemilikan modal			30%									
Jumlah tenaga kerja			11%	8%			3%					
Kapasitas produksi				17%	11%				57%		31%	
Jumlah bahan baku yang digunakan				17%					70%	36%		
Jumlah bahan tambahan yang digunakan									70%	28%		
Jumlah bahan penolong									70%	28%		
Nama merk dagang												

Sumber: Data Primer, 2017

(\*) Catatan: responden dimungkinkan memilih lebih dari satu alternatif jawaban.

Tabel 9 di atas menunjukkan penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi lebih banyak digunakan dalam pengajuan pinjaman kredit di Bank (70,5%). Pelaku UKM menggunakan informasi akuntansi dari pembukuan berupa catatan kas masuk yang berasal dari penghasilan usaha perbulan dan catatan kas keluar yang merupakan pengeluaran usaha. Sisanya pada pengurusan administrasi, pelaku UKM menggunakan informasi akuntansi yang mereka miliki sebagai syarat pengajuan PIRT (57%), IUMK (49%), dan pelaporan perpajakan usaha (45%).

Pada pengajuan syarat usaha PIRT dan IUMK, pelaku UKM menggunakan informasi akuntansi dalam pembukuan berupa jumlah modal yang dimiliki dan total aset yang digunakan dalam usaha, kapasitas produksi serta jumlah penggunaan bahan baku. Sedangkan untuk pelaporan perpajakan, pelaku UKM menggunakan informasi akuntansi dari pembukuan berupa besarnya penghasilan usaha yang diterima dari penjualan.

### **Kecenderungan Pembukuan Sebagai Kebutuhan Pengelolaan Usaha Atau Sebagai Syarat Administrasi Tertentu.**

Kecenderungan apakah pembukuan digunakan sebagai kebutuhan dalam pengelolaan usaha atau hanya sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu, disajikan dalam Tabel 10 berikut:

**Tabel 10**  
**Kecenderungan Pembukuan Sebagai Kebutuhan Pengelolaan**  
**Usaha Atau Sebagai Syarat Administrasi Tertentu**

<u>Pembukuan</u>	<u>Sebagai</u>	<u>Kebutuhan</u>	<b>Jumlah</b>	<b>Ranking</b>
			<b>Responden</b>	
<b><u>Pengelolaan Usaha</u></b>				
		Lebih mudah mengetahui sumber penghasilan usaha	86	1
		Lebih mudah mengendalikan biaya dan pengeluaran kas	80	2
		Lebih mudah dalam pengambilan keputusan usaha	75	3
		Lebih mudah mengontrol transaksi keuangan usaha	73	4
		Lebih mudah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha	71	5
		Lebih mudah mengetahui keuntungan yang diperoleh	64	6
		Lebih mudah mengetahui posisi keuangan (perkembangan usaha)	61	7
		Lebih mudah merencanakan pendanaan	60	8
		Lebih mudah mengingat transaksi berkaitan utang piutang	57	9
<b><u>Pembukuan Sebagai Pemenuhan Administrasi</u></b>				
		Lebih mudah digunakan syarat mengajukan kredit di bank dan lembaga keuangan non bank lainnya	55	10
		Digunakan sebagai syarat administrasi perizinan usaha	53	11
		Dasar laporan kepada lembaga pemerintah atau swasta pemberi pinjaman	42	12

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel 10 di atas menunjukkan penggunaan pembukuan pada pelaku UKM lebih cenderung pada kebutuhan pengelolaan usaha, dibandingkan penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi. Pembukuan yang baik akan memberi kemudahan bagi pelaku UKM dalam mengetahui sumber penghasilan usaha, mengendalikan biaya dan pengeluaran kas, serta dasar pengambilan keputusan, walaupun penyelenggaraan pembukuan tidak semata-mata untuk kebutuhan usaha saja, namun pembukuan juga diperlukan ketika pelaku UKM tersebut berhadapan dengan institusi atau pihak lain yang mensyaratkan pembukuan untuk kegiatan tertentu.

### **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan seluruh pelaku UKM yang menjadi responden memiliki informasi akuntansi dalam pembukuan berupa catatan kas masuk, catatan kas keluar, catatan biaya gaji, serta catatan biaya operasional seperti pemakaian listrik, air dan telepon. Pelaku UKM tidak memiliki catatan perkiraan biaya karena selama ini perhitungan biaya dalam usaha dilakukan berdasarkan ingatan saja. Menurut responden, sebagian besar usaha dikelola sendiri dan masih skala rumah tangga sehingga tidak perlu membuat catatan perkiraan biaya, cukup dari catatan kas masuk, catatan kas keluar, catatan biaya gaji, serta catatan biaya

operasional tersebut pelaku UKM sudah dapat melihat kondisi keuangan usaha.

Selain itu pelaku UKM juga tidak memiliki laporan keuangan. Hanya 3 pelaku UKM yang sudah memiliki laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca. Sebenarnya, pelaku UKM memiliki informasi dalam pembukuan yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan, namun pelaku UKM merasa belum perlu membuat dan memiliki laporan keuangan. Responden beranggapan bahwa pada catatan penjualan yang mereka buat sudah dapat menunjukkan apakah usahanya telah mengalami kemajuan dalam peningkatan laba, omzet dan aset untuk perkembangan usaha, sedangkan untuk catatan pembelian dapat terlihat berapa banyak bahan baku yang dibeli dan sebagai dasar penentuan harga pokok penjualan.

Selama ini Pelaku UKM mengetahui adanya laba atau rugi usaha dari selisih antara harga penjualan dan harga pembelian. Jika selisih harga penjualan dan pembelian plus itu berarti laba atau untung, jika selisih dari harga penjualan dan harga pembelian minus berarti rugi, kalau ada laba berarti modal bertambah dan jika rugi maka modal berkurang. Pelaku UKM yang tidak memiliki laporan neraca, mengetahui kekayaan mereka berdasarkan catatan kas masuk dan kas keluar, serta dari catatan persediaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan pelaku UKM sering menggunakan pembukuan sebagai kebutuhan dalam pengelolaan usaha. Penggunaan pembukuan untuk mengetahui jumlah penjualan setiap hari, mengetahui jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku, mengetahui jumlah produksi setiap hari, menyusun strategi usaha, dasar pengambilan keputusan, memperkirakan kebutuhan kas di masa yang akan datang, serta mengontrol besarnya biaya yang dikeluarkan. Lain halnya dengan penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi, pelaku UKM lebih banyak menggunakan pembukuan dalam pengajuan pinjaman kredit di Bank, serta pengurusan administrasi lain sebagai syarat pengajuan PIRT, IUMK dan pelaporan perpajakan usaha. Penggunaan pembukuan pada pelaku UKM lebih cenderung pada pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha, dibandingkan penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi. Dengan pembukuan yang dilakukan, pelaku UKM lebih mudah mengetahui sumber penghasilan usaha, lebih mudah mengendalikan biaya dan pengeluaran kas, serta lebih mudah dalam pengambilan keputusan usaha.

## **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN MENDATANG**

### **Simpulan**

Penelitian ini meneliti informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UKM dalam pembukuan, serta penggunaan pembukuan apakah untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan usaha atau hanya digunakan sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu. Informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UKM dalam pembukuan berupa catatan kas masuk, catatan kas keluar, catatan biaya gaji, serta catatan biaya operasional seperti pemakaian listrik, air dan telepon. Penggunaan pembukuan pada pelaku UKM lebih cenderung pada pembukuan sebagai kebutuhan pengelolaan usaha, dibandingkan penggunaan pembukuan sebagai syarat administrasi.

### **Implikasi**

Dari penjelasan di atas menunjukkan pelaku UKM hanya memiliki informasi akuntansi dalam pembukuan berupa informasi *additional accounting*, sedangkan untuk informasi perkiraan biaya (*budgetary*) dan informasi *statutory accounting* masih banyak ditemui pelaku UKM yang tidak memiliki informasi tersebut.

Implikasi dari sisi pelaku UKM, sebaiknya pelaku UKM tidak hanya mengandalkan ingatan saja, namun juga memiliki catatan perkiraan biaya (*budgetary*), karena



dengan informasi yang disajikan dalam bentuk anggaran berguna untuk perencanaan usaha dan pengambilan keputusan. Sama halnya dengan adanya laporan keuangan (*statutory accounting*) dapat membantu pelaku UKM untuk memenuhi persyaratan administrasi ketika pelaku UKM tersebut berhadapan dengan institusi atau pihak lain yang mensyaratkan pembukuan untuk kegiatan tertentu.

### **Keterbatasan dan Agenda Penelitian Selanjutnya**

Keterbatasan penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat mewakili jawaban dari seluruh pelaku UKM yang ada di Kota Salatiga. Peneliti hanya berfokus pada informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UKM dalam pembukuan, serta penggunaan pembukuan apakah untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan usaha atau hanya digunakan sebagai syarat pemenuhan administrasi tertentu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian dengan melihat lebih lanjut bagaimana proses pencatatan pembukuan pelaku UKM dan penggunaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustika, B., R. Auliyah dan Herawati. 2015. Merajut benang merah kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah terhadap penyusunan laporan keuangan dalam mengakses kredit dana bergulir. *Jurnal Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Anthony, R., and J. Reece. 1989. *Accounting: Text and Cases*, Richard D. Irwin. Inc., Homewood – Illinois.
- Arifin, C. 2010. Penerapan akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Studi kasus usaha pertokoan di jalan jendral sudirman Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Aufar, A. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada umkm (survei pada perusahaan rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Bestianti, B. 2015. Analisis pengetahuan akuntansi dan penerapan pencatatan akuntansi pada wirausaha muda industri kreatif di Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Bhinadi, A. 2010. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Diunduh 9 Oktober 2015
- Considine, B., A. Parkes, K. Olesen, D. Speer, and M. Lee. 2010. *Accounting Information System: Understanding Business Processes*, 3rd Edition. Milton, Qld: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Deswira, E., M. Neldi, dan Lusiana. 2009. Analisa tingkat pemahaman pengusaha sektor usaha kecil menengah (UKM) terhadap informasi akuntansi pada laporan keuangan (studi empiris pada UKM yang terdaftar di dinas koperasi dan umkm kota Padang). UPI YPTK Padang.

- Farida, H. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen – Edisi Pertama*. Bandung: ARMICO.
- Fauziah, F. 2015. Karakteristik perusahaan, karakteristik pelaku usaha dan pencatatan transaksi pada UMKM di kelurahan Tingkir kota Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Filadelfia, A. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha mikro kecil menengah atas pengadaan pembukuan (studi pada UMKM di kota Salatiga). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Fiorelli, S., M. Zifaro. 2008. "Small and Medium Enterprise Globalization: E-Service Integration in Industrial Districts," itAIS, Italy. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 9(30). <http://sprouts.aisnet.org/9-30>.
- Handayani, B. 2011. affecting factors on the use of accounting information for small and medium enterprises (SMEs). *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. 11, No. 1, page 50-67.
- Hartono, W. 2013. UMKM : Pencatatan transaksi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Hermawan, F. 2010. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil (Studi Kasus Perusahaan Kecil di Magelang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Hidayat, I. 2004. *Akuntansi untuk Usaha Kecil Menengah*. <http://imanph.wordpress.com>. Diunduh pada 11 Maret 2014.
- Hutari, F. 2016. *Mengapa Bisnis UKM Harus Urus Izin Usaha Mikro dan Kecil*. [www.seputarukm.com](http://www.seputarukm.com). Diunduh pada 20 September 2016.

- Jones, K. H., J. Price. M. Werner, and M. Doran. 1996. *Introduction to Financial Accounting: A User Perspective*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Karyawati, G. 2008. *Akuntansi Usaha Kecil Untuk Berkembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, E. P., P. I. Nugroho, dan D. Setiawati. 2011. Penerapan akuntansi usaha kecil menengah (UKM): studi kasus pada usaha dagang kota Salatiga. *Proceeding: Management The Next Opportunity and Challenge from Competition to Collaboration*. Institut Manajemen Telkom Bandung: 23-136.
- Kurniawati, E.P., P.I. Nugroho, dan F. Umiyarsih. 2011. Penerapan akuntansi untuk usaha kecil menengah (UKM). *Proceeding: Trend Penelitian Administrasi Bisnis Management*. Universitas Brawijaya Malang: 177-183.
- Kurniawati, E. P. dan F. Hermawan. 2012. Accounting for small and medium enterprises (SMEs). *The Journal Contemporary Management Research-Centre for Contemporary Management Research, Bharathidasan Institute of Management*. Special Issue 2012: page 13-22.
- Kurniawati, E. P., E. Y. Kurniawan, dan M. Kristiani. 2013. Accounting information for business decision making and performance assessment in small and medium enterprises (SMEs). *The Journal of Social Science*, 76: 67-95.
- Krisdiartiwi, M. 2008. *Pembukuan Sederhana untuk UKM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kristina, L. 2010. *Akuntansi untuk UKM (studi kasus di kecamatan Sidorejo kota Salatiga)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Pacter, P. 2007. *An Accounting Revolution is Brewing in China*. Financial Executives International © 2007. [www.financialexecutives.org](http://www.financialexecutives.org).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Industri. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Rohman, A., Zulaikha, S.N., Raharjo dan P. Harto. 2011. Kajian terhadap kapabilitas pembukuan usaha kecil dan menengah (ukm) dalam mendukung perilaku

kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol xv, No 03 Edisi September 2011, Hal 327-343.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Tanda Daftar Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perizinan Hak Merek Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Izin Sertifikat Halal.

Salinan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sambudi, J. 2016. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). <http://www.jabbarsambudi.com/2016/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.html>.

Saraswati, A. 2011. Analisis penerapan akuntansi pada usaha toko buku di kecamatan Rengat. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sari, M. J. 2011. Penerapan pencatatan keuangan pada industri kecil rumahan (studi pada pengusaha laundry kiloan di surabaya). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jawa Timur.

Setiawati, D. 2010. Penerapan akuntansi untuk usaha kecil menengah (UKM) : studi kasus di usaha

dagang kota Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Sudarsono, D. T., dan Prihandoko. 2007. *Pembukuan dan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Depok: Badan Penerbit Universitas Gunadarma.

Suhairi dan Wahdini. 2006. Persepsi akuntan terhadap overload standar akuntansi keuangan (SAK) bagi usaha kecil dan menengah. *Proceeding: Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang: hal 1-12.

Supramono dan I. Utami. 2004. *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tissor Indonesia. 2016. *Perkembangan UMKM di Indonesia*. Tissor Mitra Sukses UKM. <http://tissorindonesia.com/perkembangan-umkm-di-indonesia>.

Ulbert, S. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Universitas Wiraraja Sumenep.

Wahyuni, T. 2014. Sistem pembukuan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) konveksi kecamatan Tingkir. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Warren, C. S., J. Reeve, and P. E. Fess. 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi dua puluh satu. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, A., dan E. P. Kurniawati. 2014. Pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UKM (studi kasus pada sentra konveksi di kecamatan Tingkir kota Salatiga). *Call For Paper*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Williams, J. R., S. F. Haka., M.S.Bettner., and J.V. Carcello. 2008. *Financial and Managerial Accounting*:

*The Basis for Business Decisions*, 14th Edition. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Yamane, T. 1973. *Statistics: An Introductory Analysis*. New York Harper and Row 1971130p/statistics.

